

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Indonesia sebagai sebuah negara yang dikenal akan sebutan negara agraris, yang merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki hasil dari alamnya yang sangat luar biasa untuk berbagai kegiatan pertanian. Tanahnya yang subur serta beriklim tropis menjadi faktor utama yang menyebabkan kondisi di Indonesia ini sangat cocok untuk melakukan aktivitas pertanian. Hal inilah yang menjadikan sektor pertanian di Indonesia menjadi salah satu sektor riil yang membangun perekonomian nasional salah satunya dengan meningkatkan devisa negara dan juga menjadi salah satu tujuan dari pembangunan nasional (Ramadhana, 2013).

Salah satu sub sektor pertanian yang memiliki peran penting adalah tanaman pangan, sebab tanaman pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia untuk kelangsungan hidupnya, oleh karena itu ketersediaan pangan yang cukup bagi setiap orang pada setiap waktu merupakan hak azazi yang harus dipenuhi (Ismet, 2007; Suryana, 2008). Sektor pangan juga memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa dan negara, karna ketersediaan pangan yang tidak mencukupi kebutuhan dari suatu negara maka dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi suatu negara. Berdasarkan kenyataan tersebut masalah pemenuhan dari kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk setiap saat disuatu wilayah menjadi sasaran utama kebijakan pangan bagi pemerintahan suatu negara.

Beras menjadi komoditi pangan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia karena : (1) beras merupakan bahan pangan dan sumber kalori yang utama bagi sebagian besar bangsa Indonesia, yakni lebih dari 90% dari total penduduk Indonesia; (2) usahatani padi menyediakan lapangan kerja bagi 21 juta keluarga petani dan: (3) sekitar 30% dari total pengeluaran rumah tangga miskin dipergunakan untuk membeli beras (Bustaman, 2003).

Sebagai langkah untuk peningkatan hasil produksi usahatani dari petani padi, perlu adanya peningkatan dari faktor-faktor produksi dalam usahatani. Faktor produksi disini ialah seperti penggunaan benih unggul, curahan tenaga kerja dalam usahatani, peningkatan teknologi, pengairan, pemupukan serta pemanenan dan

pasca panen. Maka dari itu perlu adanya modal yang cukup yang tercukupi, teknologi yang adaptif, efektif dan efisien dalam budidaya padi (Juhardi, 2005).

Tinggi rendahnya suatu produksi sangat ditentukan oleh pengalokasian dari faktor produksi. Produksi dapat dinaikkan dengan mengubah kondisi penggunaan faktor produksi secara optimal (Mubyarto 1995, dalam Juhardi 2005). Oleh karena itu diperlukannya modal yang tercukupi oleh petani dalam kegiatan-kegiatan usahatani sehingga petani dapat menggunakan faktor-faktor produksi secara optimal dan juga dapat menghindari hambatan yang akan menghambat dari suatu produksi usahatani.

Permodalan merupakan salah satu masalah yang dihadapi petani selama ini terutama sulitnya persyaratan administrasi pada lembaga keuangan formal. Serta ada jaminan yang memberatkan petani pada lembaga perbankan yang bersangkutan karena lembaga perbankan tidak ingin mengambil risiko pada usaha kecil, sedangkan petani kecil tidak memiliki jaminan (*collateral*) yang sesuai dengan persyaratan yang diajukan oleh lembaga perbankan (Putri dan Heny, 2012). Kebutuhan modal ini diperkirakan akan semakin meningkat dimasa yang akan datang, seiring dengan semakin melonjaknya harga input pertanian, baik itu bibit, pupuk, obat-obatan tanaman, teknologi maupun upah tenaga kerja yang mana ini akan mempengaruhi dari produksi dan hasil produksi dari komoditi pertanian (Ashari, 2006).

Hal lainnya yang memberatkan adalah mekanisme perbankan yang menurut penduduk pedesaan menyulitkan, sangat birokratis dan biaya transaksinya mahal. Sementara bagi lembaga keuangan formal sendiri hampir tidak masuk akal melakukan transaksi dengan skala mikro karena jelas akan menyebabkan tingginya biaya transaksi dan transaksi dengan sektor usaha yang penuh resiko tidak bisa dibenarkan. Walaupun pemerintah telah memberikan subsidi dalam bentuk suku bunga rendah, namun tetap menjadi mahal apabila semua biaya diperhitungkan seperti: adanya biaya administrasi, biaya transaksi, jangka waktu yang lama, bunga bank yang sudah ditentukan kadang terdapat denda bunga akumulatif apabila nasabah menunggak pembayaran/angsuran (Setyarini 2008 dalam Kusumaningtyas 2011).

Pemerintah telah ikut serta dalam mengatasi permasalahan permodalan petani dengan mencanangkan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Program PUAP merupakan program nasional dalam rangka pengentasan kemiskinan pada sektor pertanian yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia sejak tahun 2008. Program ini bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja. Sejalan dengan format penumbuhan kelembagaan tani di pedesaan, Menteri Pertanian melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 telah menetapkan Gapoktan merupakan format final dari organisasi ditingkat petani menetapkan Gapoktan merupakan format final dari organisasi ditingkat petani diperdesaan yang didalamnya terkandung fungsi-fungsi pengelolaan antara lain unit pengolahan dan pemasaran hasil, unit penyedia saprodi, unit kelembagaan keuangan mikro.

Kebijakan pengembangan Gapoktan PUAP menjadi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) merupakan langkah strategis Kementerian Pertanian untuk menyelesaikan persoalan pembiayaan petani skala mikro dan buruh tani yang jumlahnya cukup besar diperdesaan, sehingga dapat menjadi alternatif solusi dalam mengatasi masalah permodalan bagi petani perdesaan (BPTP Sumatera Barat, 2013).

LKM-A merupakan lembaga yang dibentuk dalam mengelola dana PUAP dimana dana tersebut akan dikelola oleh pengurus LKM-A dan kemudian Gapoktan sebagai objek yang akan memperoleh dana tersebut sebagai dana bergulir (*revolving fund*). Dengan dana tersebut diharapkan dapat meningkatkan usaha ekonomi produktif. Dengan demikian, petani yang menggunakan dana PUAP memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut kepada LKM-A untuk digulirkan kembali ke petani lain dalam Gapoktan yang bersangkutan (Ratih et.all, 2015).

Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro pada tingkat petani secara otomatis membantu masyarakat dan sekaligus menjadi alternatif pembiayaan yang dapat membantu petani untuk mendapatkan akses permodalan. Akses permodalan yang baik juga akan membantu petani dalam memenuhi faktor produksi sehingga bisa meningkatkan produksi dari petani jadi dana LKM-A diharapkan dapat digunakan

petani untuk meningkatkan penggunaan input produksi, dari penggunaan input produksi yang maksimal diharapkan akan meningkatkan produksi usahatani petani.

Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) diharapkan dapat melayani petani dan pelaku agribisnis seperti pelayanan kredit, simpan pinjam dan jasa lainnya di daerah pedesaan. Teknis operasional LKM-A yang menggunakan pola "unit banking system" yaitu skim kredit menyesuaikan kebutuhan petani atau nasabah (besaran kredit, proses mendapatkan kredit lebih mudah, waktu pengembalian yang fleksibel, dll). Hal ini dianggap lebih cocok untuk petani dan usaha kecil (Departemen Pertanian, 2005).

LKM-A memudahkan petani untuk memperoleh modal untuk usahatannya sehingga kemampuan dari petani itu sendiri untuk membeli input faktor produksinya meningkat dan peningkatan penggunaan dari input faktor produksi ini akan meningkatkan produksi usahatani sehingga nantinya para petani ini dapat sejahtera dan tidak lagi bergantung kepada penyedia modal yang tidak jelas.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan permodalan di kalangan petani, meningkatkan aktivitas agribisnis dan membuka lapangan pekerjaan di pedesaan, pemerintah telah menggulirkan program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP). Hal ini dilakukan agar petani bergabung dan berpartisipasi dalam kelompok tani (Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) serta menjaga keberadaan dana PUAP sebagai aset bersama yang telah dikembangkan yaitu melalui Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A).

Berdasarkan data dari distribusi Gapoktan dan LKM-A serta perkembangan aset dari Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat per Juli 2016. Kota Payakumbuh merupakan salah satu kota yang memiliki LKM-A dengan pertumbuhan aset terbesar ketiga di Sumatera Barat yaitu sebesar 64,33%, 32 buah Gapoktan PUAP, dan 32 unit Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (Lampiran 1). Menurut data laporan bulanan pertanggung jawaban per Juli 2016 LKM-A Pincuran Bonjo merupakan unit usaha permodalan Gapoktan Tigo Sapilin

yang memiliki asset terbesar di Kota Payakumbuh sebesar Rp. 1.416.071.020 (Lampiran 2).

LKM-A Pincuran Bonjo merupakan suatu lembaga keuangan mikro yang terbentuk bukan didasari adanya program PUAP dan berdiri sebelum dana PUAP diberikan, terbentuknya LKM-A ini karena keinginan dan kebutuhan dari anggota dan masyarakat sekitar yang sadar akan butuhnya lembaga keuangan bagi petani. Keanggotaan dari Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis ini semenjak dari awal berdirinya pada tahun 2008 hingga saat sekarang ini terus mengalami peningkatan jumlah anggota pada setiap tahunnya contohnya saja pada awal berdiri tahun 2008 jumlah anggotanya 35 orang hingga pada tahun 2017 jumlah anggotanya meningkat hingga 213 orang (Lampiran 3) yang pada umumnya berprofesi sebagai petani, keanggotaan LKM-A Pincuran Bonjo merupakan gabungan dari enam kelompok tani dan juga terdiri dari masyarakat yang berada didalam maupun diluar Kelurahan Padang Alai Kec. Payakumbuh Timur, disamping itu keanggotaan LKM-A ini juga berasal dari Kabupaten 50 Kota.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2018 pada Sumbar Dalam Angka, produksi padi Kota Payakumbuh sebesar 41.150 ton dengan luas panen 7.533 Ha (Lampiran 4). Luas panen dan produksi padi sawah di kota Payakumbuh setiap tahunnya selalu meningkat berdasarkan data terakhir BPS pada tahun 2017 (Lampiran 5). Produksi padi di Kecamatan Payakumbuh Timur mencapai 9.132 ton/ha dalam periode satu tahun yaitu pada tahun 2017 dengan luas tanam padi sawah sebesar 1.640 Ha (Lampiran 6). Selain itu di Kecamatan Payakumbuh Timur, Kelurahan Padang Alai Bodi memiliki luas areal sawah sebesar 177 Ha dan menjadi luas sawah yang terluas di Kecamatan Payakumbuh Timur (lampiran 7).

LKM-A Pincuran Bonjo adalah salah satu lembaga keuangan dan pembiayaan yang didirikan, dimiliki dan dikelola bersama warga masyarakat, terutama masyarakat agribisnis, untuk memecahkan masalah serta kendala permodalan dan kebutuhan dana yang dihadapi oleh para anggotanya. Berdasarkan hasil prasurey, pola keuangan LKM-A Pincuran Bonjo berbeda dari LKMA-LKMA lainnya karena LKM-A Pincuran Bonjo menggunakan pola keuangan konvensional dan baru akan menuju ke pola keuangan syariah, pola konvensional maksudnya LKM-A masih mencari profit dari bunga dari pembiayaan dan upah

jasa yang diperoleh dari anggotanya sedangkan pola syariah disini LKM-A Pincuran Bonjo menggunakan prinsip bagi hasil dengan para anggotanya dari hasil usaha mereka.

Pada awalnya petani anggota LKM-A dapat membiayai usahatannya dari modal sendiri yang seadanya, tetapi semakin meningkatnya permintaan pasar dan kebutuhan akan padi yang menjadi bahan utama makanan masyarakat sedangkan ketersediaan hasil usaha (produksi) yang sulit untuk memenuhi kebutuhan pasar. Hal ini yang mengharuskan petani mencari sumber permodalan baru untuk sebagai tambahan modal untuk peningkatan input faktor produksi usahataninya seperti untuk pembelian bibit, pupuk dan tenaga kerja secara maksimal sehingga dapat meningkatkan hasil dari output produksi yang sehingga produksi usahatani dapat maksimal.

LKM-A Pincuran Bonjo hadir sebagai solusi sumber permodalan bagi petani anggota, dapat dilihat dari segi pembiayaan yang telah dilakukan perkembangan dari segi pembiayaan atau pinjaman yang dilakukan oleh LKM-A Pincuran Bonjo ini setiap tahunnya mengalami peningkatan dan berfluktuatif, contohnya saja pada tahun 2008 pembiayaan yang diberikan LKMA Pincuran Bonjo berjumlah Rp.56.000.000 hingga pada tahun 2018 total pembiayaan yang diberikan LKMA mencapai angka Rp.1.540.625.000 (Lampiran 8), dan LKM-A ini memberikan pinjaman maksimal kepada anggotanya sesuai dengan ketentuan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- dengan agunannya tergantung dari kesepakatan dan perjanjian kedua belah pihak. Jenis pembiayaan yang diberikan sesuai dengan keputusan dari Rapat Anggota Tahunan LKM-A Pincuran Bonjo yang dilakukan setiap akhir tahun untuk mengevaluasi kegiatan LKM-A ini selama setahun belakangan dan juga merumuskan rencana LKM-A kedepannya (Lampiran 9).

Selalu meningkatnya jumlah pembiayaan ini seharusnya juga dapat dipergunakan secara maksimal oleh petani untuk memaksimalkan input produksinya sehingga hasil dari usahatannya pun akan mendapatkan hasil yang maksimal sehingga dana pembiayaan berupa kredit ini dapat berpengaruh terhadap input produksi dan juga hasil output produksi usahatani padi anggota LKM-A Pincuran Bonjo.

Dari total 219 orang anggota LKM-A Pincuran Bonjo sebanyak 205 anggotanya mendapatkan pembiayaan di sektor yang berbeda-beda, 22 orang diantaranya yang mendapatkan pembiayaan di bidang usahatani padi (Lampiran 10). Usahatani Padi memerlukan dukungan dana pembiayaan yang cukup besar dan cukup tinggi serta penggunaan dana yang baik untuk meningkatkan hasil produksinya. Adapun kegunaan dari dana pembiayaan bagi petani padi ialah sebagai bantuan modal dan biaya yang digunakan dari memulai usahatannya sampai akhir proses dari usahatani padi itu sendiri. Namun perlu diketahui lebih lanjut apakah pembiayaan dari LKM-A Pincuran Bonjo ini benar-benar dipergunakan untuk peningkatan faktor-faktor produksi dari usahatani padi anggota yang mendapatkan pembiayaan sehingga nantinya dana yang diberikan digunakan tepat tujuan untuk meningkatkan faktor produksi usahatani yang nanti juga akan mendorong peningkatan hasil dari usahatani padi anggota.

Banyaknya anggota LKM-A Pincuran Bonjo yang diberikan pembiayaan dari sekian banyak jenis usaha dan skala peminjamannya juga berbeda-beda maka perlu dilihat apa saja karakteristik dari petani padi yang mendapatkan pinjaman bisa mendapatkan pinjaman dan diberikan pinjaman oleh LKM-A sehingga nantinya dapat menjadi landasan kenapa penting dan perlunya pemberian pembiayaan kepada petani padi ini dipergunakan sebaik mungkin untuk penguatan faktor produksi dan meningkatkan hasil dari usahanya.

Pengaruh dari pemberian kredit atau pembiayaan dari LKM-A kepada petani padi ini dilihat untuk mengetahui seberapa berpengaruhnya bantuan modal yang diberikan untuk peningkatan dari produksi para petani, peningkatan produksi ini dilihat dari peningkatan penggunaan faktor-faktor produksinya, apakah petani penerima kredit ini telah mempergunakan kreditnya sebaik mungkin sehingga produktivitas pertaniannya dapat maksimal.

Modal memiliki peranan penting atas kenaikan dan penurunan produksi padi karena adanya perubahan penggunaan faktor-faktor produksi. (Soekartawi,1995) menyatakan bahwa produk-produk pertanian dihasilkan dari kombinasi faktor produksi lahan, tenaga kerja dan modal yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan (pupuk, benih, dan obat tanaman) selama usaha tani berlangsung. Dalam usaha pertanian penggunaan faktor-faktor produksi memegang

peranan yang sangat penting, karena kurang tepatnya penggunaan jumlah dan kombinasi faktor produksi mengakibatkan rendahnya produksi yang dihasilkan atau tingginya biaya produksi, rendah atau tingginya produksi akan berpengaruh terhadap hasil usahatani dan pendapatan dari petani.

Dari berbagai permasalahan diatas penulis mengambil topik yang ada pada pengaruh pembiayaan usahatani padi bagi para petani didaerah penelitian penulis karena anggota LKM-A Pincuran Bonjo yang meminjam untuk modal usahatannya sebagian besar merupakan masih dalam skala kecil maupun terkendala masalah modal yang apabila dikembangkan dengan bantuan modal dari LKM-A maka prospek dari usahanya akan bagus kedepannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka pertanyaan penelitian yaitu :

1. Bagaimana petani mengalokasikan dana pembiayaan yang diberikan LKM-A Pincuran Bonjo disektor usahatani padi ?
2. Bagaimana pengaruh dari pembiayaan LKM-A Pincuran Bonjo terhadap usahatani padi anggota ?

Dari pertanyaan tersebut maka penulis perlu untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pengaruh Kredit Terhadap Usahatani Padi Anggota LKM-A Pincuran Bonjo di Kelurahan Padang Alai Bodi Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh”**.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui alokasi dana pembiayaan oleh petani anggota dari LKM-A Pincuran Bonjo disektor usahatani padi.
2. Menganalisis pengaruh dari pembiayaan yang diberikan LKM-A Pincuran Bonjo terhadap usahatani padi anggota.

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Bagi LKM-A Pincuran Bonjo, penelitian ini sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi LKM-A Pincuran Bonjo dalam membuat keputusan bagi pengembangan LKM-A ini kedepannya.
2. Sebagai Bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan tentang LKM-A.



3. Dapat memberikan masukan bagi pemilik usahatani padi dalam memanfaatkan kredit maupun pembiayaan dari LKM-A guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.
4. Bagi penulis dan pihak akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan gagasan dan informasi yang berkaitan dengan hasil penelitian ini untuk melakukan penelitian selanjutnya.

